

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan yang luas. Hutan di Indonesia tersebar di berbagai pulau besar yakni Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Hutan terbagi ke dalam beberapa jenis yakni hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Hutan memiliki fungsi yang penting untuk kehidupan manusia. Definisi hutan sendiri menurut Kadri (dalam Indriyanto, 2010, hlm. 6) adalah “lapangan yang ditumbuhi pepohonan, secara keseluruhan sebagai persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya atau ekosistem”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, di Kampung Sukawana RW 13 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat terdapat hutan lindung seluas 850 hektar yang berisi pohon pinus. Menurut pemaparan dari Pak Oma selaku ketua RW 12, pada awalnya di daerah hutan lindung tersebut bebas dari pemukiman penduduk. Lokasi hutan lindung yang berdekatan dengan perkebunan teh, membuat para pekerja kebun teh yang sudah pensiun ataupun para pekerja yang sudah keluar dari perkebunan teh mulai menempati dan mendirikan rumah di lahan kawasan hutan lindung. Para pensiunan pekerja kebun teh maupun pekerja kebun teh yang sudah keluar berasal dari luar Bandung. Ada beberapa alasan masyarakat tidak dapat kembali ke daerah asal, diantaranya rumah di daerah asal sudah dijual, tidak ada sanak saudara, nyaman dengan suasana di kampung Sukawana, maupun karena desakan ekonomi dan kebutuhan pokok masyarakat. Semakin lama pemukiman penduduk di kawasan hutan lindung pun semakin bertambah. Masyarakat yang tinggal disana terdiri dari berbagai usia, mayoritas masyarakat setempat sudah lanjut usia. Mereka sudah turun temurun menghuni pemukiman di lahan hutan lindung tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat rata-rata menengah ke bawah, bahkan masyarakat yang sudah lanjut usia kebanyakan tidak bisa membaca atau buta aksara. Mata pencaharian mereka beragam ada yang pegawai toko, tukang ojeg, pemetik teh, namun sebagian besar mereka bekerja sebagai buruh kasar dengan penghasilan yang tidak tetap.

Hingga saat ini berdasarkan data kependudukan setempat tahun 2013, lahan hutan lindung tersebut sudah ditempati oleh 53 kepala keluarga (KK). Selain pemukiman di lahan hutan lindung tersebut terdapat pula 11 kandang hewan ternak, 7 warung serta pekarangan di depan rumah masing-masing. Berubahnya penggunaan lahan hutan lindung menjadi lahan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tersebut mengakibatkan konversi penggunaan lahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sitorus (2004, hlm. 12) sebagai berikut :

Hampir setiap aktivitas manusia melibatkan penggunaan lahan karena jumlah dan aktifitas manusia bertambah dengan cepat, maka lahan menjadi sumber yang langka. Keputusan untuk mengubah pola penggunaan lahan mungkin memberikan keuntungan atau kerugian yang besar, baik ditinjau dari pertigaan ekonomis maupun terhadap perubahan lingkungan walaupun dalam keadaan yang tidak begitu nyata. Dengan demikian, membuat keputusan tentang penggunaan lahan merupakan aktivitas politik dan sangat dipengaruhi keadaan sosial ekonomi.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 di kantor Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat terdapat perjanjian antara Perum Perhutani KPH Bandung Utara dengan masyarakat setempat terkait dengan penanganan konflik tenurial (Penggunaan Kawasan Tanpa Ijin) yang menyebabkan masyarakat resah. Berdasarkan hasil perjanjian bahwasanya lokasi di Kampung Sukawana Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat yang terdiri dari 62 Petak RPH Cisarua BKPH Lembang KPH Bandung Utara seluas 1,5 Hektar harus kembali ke fungsi semula sehingga fungsi-fungsi hutan dari aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dapat terjaga kelestariannya. Keberadaan masyarakat yang menduduki kawasan hutan lindung harus secepatnya keluar dari kawasan hutan yang diduduki. Perjanjian tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan pasal 1 no 4 yang diambil dari web resmi Badan Pengawasan dan Pembangunan yang tersedia dalam <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/6/581.bpkp> diakses pada pada hari Senin 17 November 2014 pukul 19.45 WIB memaparkan bahwasanya “hutan

lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Dari perjanjian antara masyarakat dengan Perhutani tersebut menimbulkan polemik tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat bingung mau pindah kemana karena mereka sudah menggantungkan hidupnya di kawasan hutan lindung tersebut. Masyarakat pun meminta Perhutani menyediakan lahan untuk tempat tinggal mereka, namun dari pihak Perhutani tidak dapat menyediakan lahan pengganti untuk masyarakat. Akhirnya hingga saat ini, masyarakat masih menetap di kawasan hutan lindung tersebut.

Adanya perbedaan kepentingan antara Perhutani dengan masyarakat memunculkan pertentangan tersendiri. Terjadinya alih fungsi lahan tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berkepentingan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan lindung dengan kepentingan ekonomi masyarakat.

Ditinjau dari segi sosiologis, permasalahan tersebut merupakan konflik antara masyarakat dengan Perhutani. Dilihat dari sumber konfliknya, konflik tersebut termasuk konflik vertikal. Maftuh (2008, hlm. 29) menjelaskan bahwa konflik vertikal ialah “pertentangan antara dua pihak yang memiliki kedudukan sosial yang berbeda”. Dalam penelitian ini, pertentangan terjadi antara kedudukan sosial yang berbeda yakni antara Perhutani dengan masyarakat, dimana Perhutani memiliki otoritas sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan Maftuh (2008, hlm. 29) yang menyatakan kedudukan sosial yang berbeda diantaranya “antara yang memiliki otoritas dengan yang tidak memiliki otoritas, atau antara superordinat dengan subordinat”.

Konflik sosial di atas merupakan konflik realistik karena bersumber dari masyarakat dan ada pihak yang dirugikan. Perjanjian dengan Perum Perhutani KPH Bandung Barat mengecewakan dan meresahkan masyarakat, sementara masyarakat sudah menjadikan lahan hutan lindung tersebut sebagai kebutuhan

hidupnya. Jika hal ini dibiarkan maka konflik akan semakin membesar dan tidak menutup kemungkinan adanya bentrokan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Coser dalam Ritzer dan Goodman (2011, hlm. 65) :

Konflik realistik adalah konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan serta ditunjukkan pada objek yang di anggap mengecewakan.

Adapun kajian terdahulu yang dilakukan oleh Luqman (2013, hlm. 93) yang diambil dari skripsi program studi geografi FPIPS UPI tahun 2013 mengenai “Analisis Kerusakan Mangrove Akibat Aktivitas Penduduk di Pesisir kota Cirebon” menunjukkan bahwa konversi lahan mangrove terjadi karena aktivitas penduduk setempat yakni pemukiman dan tambak sehingga mangrove mengalami kerusakan.

Kajian lainnya dilakukan oleh Rustandi (2013, hlm. 102) yang diambil dari skripsi program studi geografi FPIPS UPI tahun 2013 mengenai “Dampak Konversi Lahan Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung” menunjukkan bahwa terdapat konversi lahan yang cukup besar terjadi pada lahan seluas 407,1 Ha yang disebabkan alih fungsi lahan yang terjadi penggunaan lahan pertanian menjadi pemukiman. Konversi lahan ini mempengaruhi kondisi sosial masyarakat menjadi semakin maju dan mata pencaharian semakin banyak.

Kajian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa banyak lahan hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan komersial salah satunya lahan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, harus ada penyelesaian dari masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang gambaran persoalan konflik yang ada di masyarakat Kampung Sukawana Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat. Maka dari itu penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Konflik Masyarakat dengan Perhutani

akibat Pengambilan Lahan Kehutanan (Studi Kasus di Kampung Sukawana Desa Karyawangi Parongpong Bandung Barat)”

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dan melihat kondisi nyata di lapangan, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Perbedaan kepentingan antara masyarakat di Kampung Sukawana yang menempati lahan kehutanan milik Perhutani dengan Perhutani,
2. Alih fungsi lahan hutan lindung menjadi lahan pemukiman yang sering terjadi di berbagai daerah
3. Keresahan masyarakat yang tinggal di lahan hutan lindung milik Perhutani di Kampung Sukawana akibat perjanjian antara Perum Perhutani KPH Bandung Utara dengan masyarakat setempat terkait dengan penanganan konflik tenurial (Penggunaan Kawasan Tanpa Ijin)
4. Belum terselesaikannya permasalahan penggunaan lahan di Kampung Sukawana

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang dan hasil identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah pokok, yaitu “bagaimana gambaran konflik antara Perhutani dengan masyarakat yang menempati lahan hutan lindung di Kampung Sukawana Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat?”. Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana asal mula masyarakat Kampung Sukawana yang tinggal di lahan hutan lindung milik Perhutani ?
2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara masyarakat di Kampung Sukawana dengan Perhutani?
3. Bagaimana upaya masyarakat Kampung Sukawana yang tinggal di lahan hutan lindung dan Perhutani dalam menyelesaikan konflik yang terjadi?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konflik masyarakat dengan Perhutani di Kampung Sukawana RW 13 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

2. Tujuan Khusus

Sesuai dengan pembatasan dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

- a. Asal mula masyarakat Kampung Sukawana yang tinggal di lahan hutan lindung milik Perhutani.
- b. Latar belakang penyebab konflik antara masyarakat di Kampung Sukawana dengan Perhutani.
- c. Upaya masyarakat Kampung Sukawana yang tinggal di lahan hutan lindung dan Perhutani dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami disiplin sosiologi dan disiplin ilmu yang terkait lainnya khususnya mengenai konflik dalam masyarakat akibat alih fungsi lahan hutan lindung (berbagai sumber konflik di masyarakat). Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori dan prinsip-prinsip dalam meminimalisasi konflik dengan menggunakan pendekatan disiplin sosiologi.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama orang-orang yang berhubungan dengan dunia pendidikan seperti:

- a. Bagi mahasiswa Program Pendidikan Sosiologi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur untuk penelitian selanjutnya yang masih terkait dengan tema skripsi ini.
- b. Bagi pemerintah diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan dalam penyusunan peraturan mengenai alih fungsi lahan hutan lindung.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan konflik akibat alih fungsi lahan.
- d. Bagi Penulis, penelitian ini sebagai acuan untuk memperluas pemikiran dan pengalaman penulisan karya ilmiah sekaligus menjadi acuan dan refleksi untuk mengatasi maraknya konflik sosial di masyarakat
- e. Bagi Program studi Pendidikan Sosiologi, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber belajar dan memperluas kajian mengenai pendidikan resolusi konflik.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi ini terdiri dari Bab I yaitu pendahuluan yang berisi latarbelakang penelitian, identifikasi penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi. Pada Bab II berisi kajian pustaka mengenai konsep masyarakat pengguna lahan hutan, alih fungsi lahan serta konsep konflik. Pada Bab III berisi metode penelitian yang memuat desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, prosedur penelitian, uji keabsahan data, analisis data dan isu etik. Di Bab IV berisi temuan penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah penelitian. Kemudian di Bab V berisi simpulan dan rekomendasi.